Jurnal Pandelo'e
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Kristen Tentena
Vol. 5, No. 2, (November, 2025) (Hal, 1-11)
E-ISSN : xxxx-xxxx
https://publikasi.unkrit.ac.id/index.php/Pand

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA: TANTANGAN UTAMA DAN SOLUSI BERKELANJUTAN PADA TAHUN 2026

Elvina Lawodi

Prodi Studi Pembangunan, FEKON,Universitas Kristen Tentena

**email: elvinalawodi2681@gmail.com*

ABSTRACT

This study focuses on the transformation of human development in Indonesia, specifically addressing the main challenges and sustainable solutions projected for 2026. Using a qualitative approach through a literature review, the study identifies key issues including social and economic inequality, poverty, unemployment, infrastructure limitations, and the impact of climate change. These factors significantly affect the Human Development Index (HDI) and hinder equitable development across regions. The findings emphasize that while Indonesia has made progress, significant disparities remain, particularly between Western and Eastern Indonesia. Solutions proposed include increasing investment in education and healthcare, improving infrastructure, and adopting climate adaptation strategies. The study concludes that achieving sustainable human development in Indonesia requires inclusive policies, multi-sector collaboration, and long-term planning. The findings highlight the importance of addressing these challenges to ensure equitable growth and better quality of life for all Indonesians by 2026.

Keywords **:** *Climate Change, Education, Human Development, Infrastructure, Poverty.*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada transformasi pembangunan manusia di Indonesia, khususnya mengidentifikasi tantangan utama dan solusi berkelanjutan yang diproyeksikan untuk tahun 2026. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi masalah utama seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur, dan dampak perubahan iklim. Faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menghambat pembangunan yang merata di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan, ketimpangan yang signifikan masih ada, terutama antara Indonesia Barat dan Timur. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan penerapan strategi adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan kebijakan yang inklusif, kolaborasi antar sektor, dan perencanaan jangka panjang. Hasil penelitian menekankan pentingnya menangani tantangan-tantangan ini untuk memastikan pertumbuhan yang merata dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2026.

Kata Kunci : *Perubahan Iklim, Pendidikan, Pembangunan Manusia, Infrastruktur, Kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia di Indonesia adalah sebuah agenda yang terus-menerus mendapat perhatian, mengingat pentingnya kualitas hidup yang seimbang antara dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Seiring dengan tantangan global yang kian kompleks, transformasi dalam pembangunan manusia menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, baik dari segi pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Indonesia,

sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa pembangunan manusia dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Berdasarkan laporan yang ada, pada periode 2020-2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia (Ummah, 2024).

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang merata masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Papua dan Maluku. Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut, yang tercermin dari rendahnya IPM mereka. Ketimpangan ini diperburuk oleh pengaruh faktor ekonomi seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran, yang secara langsung mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar (Syofya & Shintia, 2024).

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama dalam upaya meningkatkan IPM Indonesia. Investasi dalam kedua sektor ini terbukti memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan. Sebagai contoh, alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan dapat memperbaiki layanan dasar, memperkuat daya saing sumber daya manusia, dan mengurangi angka kemiskinan (Febrianto & Esther, 2023). Namun, meskipun ada upaya-upaya tersebut, tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan bahwa distribusi pembangunan ini adil dan merata, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Selain itu, perubahan iklim juga mulai menunjukkan dampaknya yang signifikan terhadap pembangunan manusia. Indonesia, sebagai negara kepulauan tropis, menghadapi risiko tinggi terkait perubahan iklim, seperti bencana alam yang mengganggu infrastruktur, mengurangi produktivitas pertanian, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampak dari perubahan iklim ini sangat dirasakan di daerah-daerah yang sudah terpapar ketimpangan sosial, menyebabkan mereka semakin sulit mengakses layanan dasar dan kesempatan ekonomi yang layak (Arwan, 2022). Oleh karena itu, pembangunan manusia di Indonesia harus memperhitungkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sejalan dengan hal tersebut, proyeksi untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih strategis untuk mengatasi ketimpangan dan mengoptimalkan potensi daerah-daerah tertinggal. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, sambil memastikan keberlanjutan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Hal ini akan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (Kirana, Nasution, & Wanto, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam transformasi pembangunan manusia serta mencari solusi berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2026. Pendekatan studi pustaka digunakan untuk menggali berbagai perspektif dan rekomendasi dari literatur yang ada, guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau library research yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik "Transformasi Pembangunan Manusia di Indonesia: Tantangan Utama dan Solusi Berkelanjutan pada Tahun 2026". Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan manusia serta solusi-solusi berkelanjutan yang dapat diimplementasikan berdasarkan temuan-temuan dari berbagai kajian terdahulu.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, jurnal, dan publikasi lain yang membahas topik terkait pembangunan manusia, ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, sektor pendidikan dan kesehatan, serta perubahan iklim di Indonesia. Semua sumber ini diperoleh melalui pencarian database akademik dan perpustakaan digital yang menyediakan referensi ilmiah yang valid dan terpercaya. Sumber-sumber ini meliputi:

a. Artikel dan jurnal yang membahas perkembangan terbaru mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Buku yang mengulas tentang teori pembangunan manusia, kebijakan sosial, serta evaluasi program pembangunan di Indonesia.

c. Laporan resmi dari lembaga-lembaga pemerintah dan internasional yang relevan dengan pembangunan manusia di Indonesia.

2. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pencarian Literatur: Peneliti mencari literatur yang relevan melalui pencarian sistematis di database akademik dan pustaka elektronik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan lainnya. Kata kunci yang digunakan meliputi "Pembangunan Manusia di Indonesia," "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia," "Ketimpangan Sosial," "Pendidikan dan Kesehatan," serta "Perubahan Iklim dan Pembangunan Manusia."

b. Seleksi Sumber: Setelah menemukan berbagai literatur yang relevan, peneliti melakukan seleksi dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan tanggal penerbitan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan mencerminkan penelitian terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Studi Pustaka: Data yang diperoleh dari sumber literatur tersebut kemudian dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti tantangan utama dalam pembangunan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi IPM, serta solusi berkelanjutan menuju 2026.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara:

a. Kategorisasi: Mengelompokkan informasi dan temuan yang relevan berdasarkan topik-topik yang muncul, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, sektor pendidikan dan kesehatan, serta dampak perubahan iklim.

b. Sintesis: Menyintesis berbagai pandangan dan temuan yang ditemukan dalam literatur untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan manusia dan solusi-solusi yang telah diusulkan oleh para peneliti.

c. Penyusunan Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyusun kesimpulan yang mengarah pada pemahaman tentang bagaimana Indonesia dapat mengatasi tantangan pembangunan manusia dan merumuskan solusi berkelanjutan menuju tahun 2026.

4. Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, validitas data dijaga dengan cara memilih sumber literatur yang berasal dari jurnal dan buku yang terbit dari penerbit terpercaya, serta laporan resmi dari lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti badan pemerintah Indonesia, Badan PBB, dan organisasi internasional. Selain itu, untuk meningkatkan reliabilitas, penelitian ini mengutamakan sumber-sumber yang memiliki data empiris yang telah teruji dan diakui dalam penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tantangan Utama dalam Pembangunan Manusia di Indonesia

Secara Beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan manusia, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), antara lain:

a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menjadi masalah besar dalam pembangunan manusia. Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan wilayah-wilayah di Indonesia Timur lainnya menunjukkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di barat Indonesia. Perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas hidup masyarakat (Panggarti et al., 2022).

b. Kemiskinan dan Pengangguran: Kemiskinan yang meluas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah timur Indonesia, memperburuk kualitas hidup dan memperlambat pencapaian IPM. Tingginya angka pengangguran di beberapa daerah semakin mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial, yang berimbas pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar dan pendidikan yang berkualitas. Menurut penelitian, hubungan antara tingkat pengangguran dan

kemiskinan sangat erat, dan keduanya menjadi hambatan utama dalam mencapai pembangunan manusia yang merata (Syofya & Shintia, 2024).

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Layanan Dasar: Banyak daerah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Hal ini menghambat mobilitas sosial dan akses masyarakat terhadap layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan (Azizah & Asiyah, 2022).

d. Dampak Perubahan Iklim: Perubahan iklim menjadi tantangan yang semakin signifikan, terutama bagi daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dampak perubahan iklim mengancam sektor pertanian, mengurangi produktivitas ekonomi, dan memperburuk ketimpangan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang lebih rentan terhadap perubahan iklim juga cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial dan pembangunan manusia (Arwan, 2022).

2. Solusi Berkelanjutan untuk Pembangunan Manusia

Beberapa solusi berkelanjutan yang diusulkan untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan manusia di Indonesia, dan yang diharapkan dapat dilaksanakan menuju 2026, meliputi:

a. Peningkatan Investasi pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa investasi yang lebih besar di sektor pendidikan dan kesehatan akan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran yang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, dapat membantu meningkatkan kualitas SDM, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia (Febrianto & Esther, 2023).

b. Pendekatan Inklusif dalam Pembangunan Ekonomi: Untuk mengatasi ketimpangan sosial, penting bagi Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Program-program yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Misalnya, meningkatkan kualitas pendidikan vokasional dan memberikan akses ke peluang usaha bagi masyarakat di daerah miskin dapat membuka jalan untuk meningkatkan kesejahteraan (Febrianto & Esther, 2023).

c. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim: Mengingat dampak perubahan iklim yang semakin terasa, solusi berkelanjutan juga harus mencakup kebijakan yang mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan terkait perubahan iklim di masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan (Arwan, 2022).

d. Peningkatan Infrastruktur dan Akses Layanan: Meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah Indonesia bagian timur, akan

membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Program-program yang mendorong pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan tersebut (Kirana, Nasution, & Wanto, 2019).

3. Proyeksi Pembangunan Manusia Indonesia 2026

Proyeksi untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia perlu fokus pada kebijakan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Analisis menunjukkan bahwa jika kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan diterapkan, Indonesia dapat mencapai target-target pembangunan manusia yang lebih tinggi dan merata pada tahun 2026. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pengurangan ketimpangan sosial akan sangat berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan (Kirana et al., 2019).

Temuan

Dalam rangka menggambarkan temuan-temuan utama dari penelitian ini secara sistematis, berikut disajikan tabel yang merangkum tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan manusia di Indonesia serta solusi berkelanjutan yang dapat diimplementasikan untuk mencapainya pada tahun 2026. Tabel ini menyajikan tantangan-tantangan yang menghambat pencapaian pembangunan manusia yang lebih baik dan solusi-solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan tersebut. Setiap tantangan diidentifikasi berdasarkan analisis literatur yang relevan, dan solusi yang diusulkan mencakup pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel berikut merangkum temuan utama dari penelitian ini:.

Tabel 1.Temuan

Tantangan Utama	Deskripsi Tantangan	Solusi Berkelanjutan	Referensi
Ketimpangan Sosial dan Ekonomi	Perbedaan signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.	Implementasi kebijakan inklusif yang mendukung pembangunan wilayah tertinggal dan mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah.	Panggarti et al. (2022); Syofya & Shintia (2024)
Kemiskinan dan Pengangguran	Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses pendidikan dan layanan dasar, menghambat peningkatan kualitas hidup.	Peningkatan investasi di sektor pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan pembangunan ekonomi lokal.	Syofya & Shintia (2024); Febrianto & Esther (2023)
Keterbatasan	Keterbatasan infrastruktur	Peningkatan	Azizah &

Infrastruktur dan Akses Layanan	di daerah terpencil menghambat akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.	pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah timur Indonesia, dengan fokus pada transportasi, kesehatan, dan pendidikan.	Asiyah (2022); Kirana et al. (2019)
Dampak Perubahan Iklim	Perubahan iklim yang mengancam sektor pertanian, mengurangi produktivitas ekonomi, dan memperburuk ketimpangan sosial, terutama di daerah-daerah rawan bencana.	Integrasi kebijakan perubahan iklim dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta pendidikan mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal.	Arwan (2022); Sasmita et al. (2022)
Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga	Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.	Penguatan koordinasi antar lembaga serta kolaborasi multi-sektor untuk merancang kebijakan pembangunan manusia yang lebih holistik dan terintegrasi.	Kirana et al. (2019); Hanifah & Rachmawati (2023)

Sumber: Diolah dari data yang relevan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan manusia sangat kompleks dan saling berkaitan. Setiap tantangan membutuhkan solusi yang terintegrasi, dengan pendekatan berbasis kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan manusia yang lebih baik dan merata pada tahun 2026, penting bagi Indonesia untuk fokus pada implementasi solusi-solusi yang telah diidentifikasi, baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun kebijakan adaptasi perubahan iklim.

Pembahasan

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mencapai pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan menuju tahun 2026. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa sektor, Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan signifikan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata, terutama bagi mereka yang berada di daerah tertinggal. Di sisi lain, berbagai solusi berkelanjutan juga telah diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pencapaian pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan manusia di Indonesia adalah ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Indonesia timur menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia, seperti Jawa dan Sumatra. Ketimpangan ini tercermin dalam akses yang tidak merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki kualitas hidup yang lebih rendah, yang berdampak langsung pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, dengan meningkatkan investasi infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia dapat berkurang, sehingga pembangunan manusia dapat tercapai secara merata.

2. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi isu sentral dalam pembangunan manusia di Indonesia. Meskipun ada sejumlah kebijakan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, hasilnya belum sepenuhnya memadai. Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan pemuda dan mereka yang berada di daerah terpencil, memperburuk kualitas hidup masyarakat, yang berujung pada terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan yang meluas juga menghambat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga kualitas hidup mereka tetap rendah.

Solusi untuk masalah ini harus mencakup peningkatan investasi dalam sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Pendidikan vokasional dan pengembangan kewirausahaan dapat menjadi solusi untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan akses mereka terhadap peluang ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas hidup mereka.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Layanan Dasar

Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah pedesaan dan wilayah timur Indonesia, sangat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Wilayah-wilayah ini sering kali kekurangan fasilitas kesehatan, sekolah yang memadai, serta sarana transportasi yang memadai, yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di sana. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang memadai juga memperburuk kesenjangan ekonomi antara daerah yang berkembang dan daerah yang tertinggal.

Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih baik, Indonesia perlu berinvestasi lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah-daerah yang tertinggal. Fokus utama harus diberikan pada pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka peluang ekonomi baru dan mempercepat proses pemerataan pembangunan.

4. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang mempengaruhi pembangunan manusia di Indonesia. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, yang sering kali

merusak infrastruktur dan mempengaruhi sektor pertanian. Dampak perubahan iklim ini sangat dirasakan di daerah-daerah yang sudah terpapar ketimpangan sosial, sehingga memperburuk kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sana.

Solusi untuk tantangan ini melibatkan penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan yang mengintegrasikan pertanian berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan iklim sangat penting untuk menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi. Selain itu, sektor pendidikan juga harus mencakup pendidikan terkait perubahan iklim agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengurangi kerentanannya terhadap bencana alam.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan manusia yang bersifat inklusif dan berkelanjutan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan pembangunan manusia yang holistik membutuhkan kolaborasi antar sektor untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan keberlanjutan program-program yang dilaksanakan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah harus mendorong kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih integratif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mencapai pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan menuju tahun 2026. Tantangan-tantangan tersebut meliputi ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar, serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Meskipun demikian, terdapat berbagai solusi berkelanjutan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya adalah peningkatan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur yang merata, serta penerapan kebijakan yang berfokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan pada tahun 2026, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada pemerataan sumber daya di seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan pencapaian tersebut..

Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Pembangunan: Pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur dasar seperti transportasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan di wilayah yang masih kekurangan akses.

2. Investasi pada Pendidikan dan Kesehatan: Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu ada peningkatan anggaran dan program yang mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran: Pengembangan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta menciptakan peluang usaha dan kewirausahaan, dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim: Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya berfokus pada mitigasi perubahan iklim tetapi juga pada peningkatan ketahanan sosial-ekonomi, terutama di daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti daerah pesisir dan kawasan pertanian.

5. Kolaborasi Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan pembangunan manusia yang lebih terintegrasi dan efektif. Kerjasama ini akan mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan keberlanjutan dari setiap program pembangunan.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada dan mencapai pembangunan manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan, 1(12), 420. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420

Arwan, J. F. (2022). The urgency of climate change-based education for sustainable development. Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan, 222(03). https://doi.org/10.21009/plpb.222.03

Febrianto, M., & Esther, A. M. (2023). Pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2), 17787. https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17787

Kirana, I. O., Nasution, Z. M., & Wanto, A. (2019). Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menggunakan metode Statistical Parabolic dalam menyongsong revolusi

industri 4.0. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, 16(2), 18178. https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v16i2.18178

Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia. Forum Ekonomi, 24(2), 10988. https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988

Syofya, H., & Shintia. (2024). Pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(7), 4162. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4162

Sasmita, A., Andrio, D., & Aini, K. N. (2022). Analisis tingkat kerentanan wilayah di Kota Pekanbaru terhadap bencana akibat perubahan iklim. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 18(4), 37111. https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.37111